

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan sebagai wilayah maritim dengan garis pantai yang sangat panjang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia dengan panjang 99.093 km¹. Dengan demikian Indonesia Memiliki begitu banyak ekosistem yang berada di perairan laut, sehingga menjadikan Indonesia salah satu Negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu bagus. Dengan adanya pertukaran massa air di dalamnya yang mana karena hal ini sehingga menyebabkan perairan Indonesia semakin kaya akan berbagai jenis biota-biota laut yang biasanya biota-biota ini selalu ditemukan di perairan pesisir².

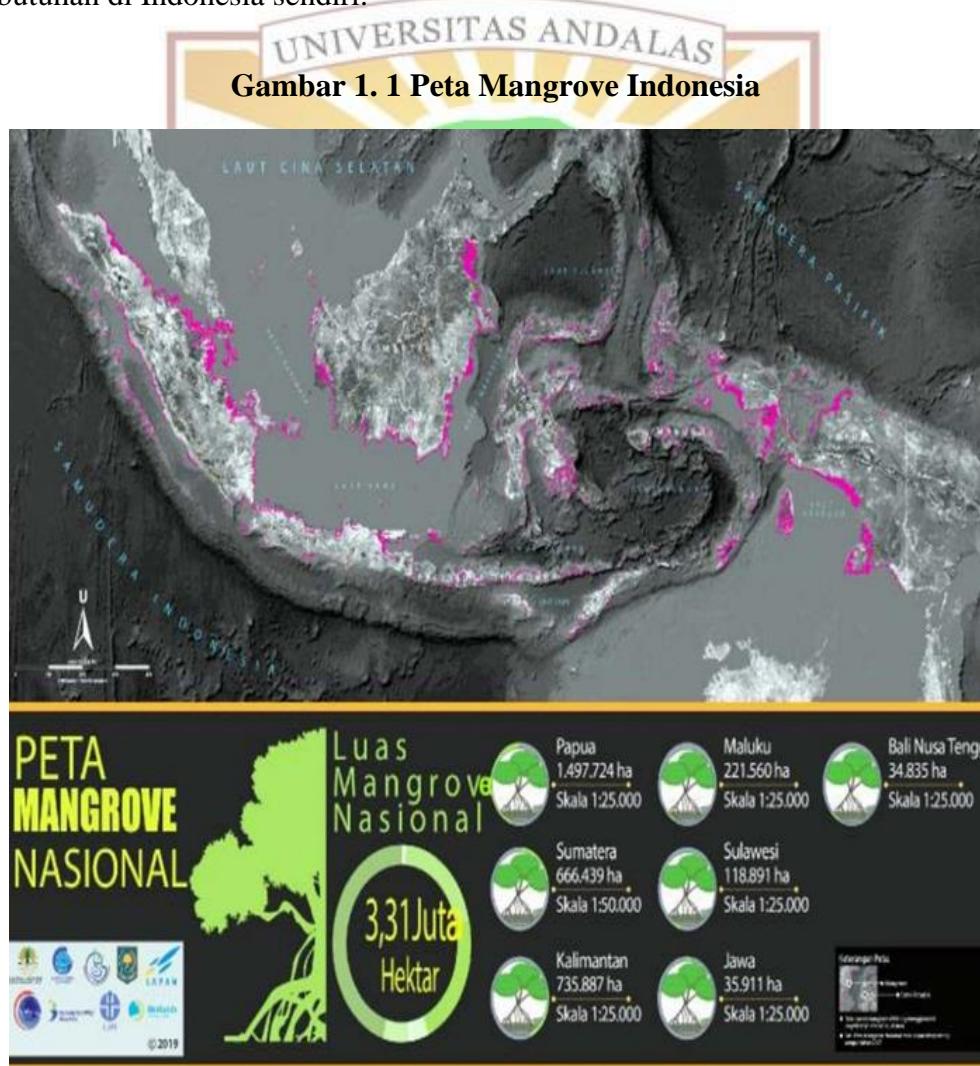
Dengan banyaknya ekosistem yang ada yang berada di perairan pesisir pantai ini menjadi pendukung akan kestabilan kehidupan yang berada di dalam perairan/ pesisir sepanjang pantai. Salah satunya yakni dengan keberadaan mangrove memberikan banyak manfaat bagi seluruh keadaan yang berada di pesisir pantai. Begitu juga dengan keadaan hutan mangrove yang ada di dunia saat sekarang ini yaitu sekitar 16.530.000 (ha), dan dimana pada saat sekarang ini Indonesia memiliki 3.490.000 Ha atau 21% mangrove yang ada di dunia³.

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, 2018.

² Sipahelut, dkk. (2019). Manajemen Personalia, Edisi keempat, Erlangga,Jakarta

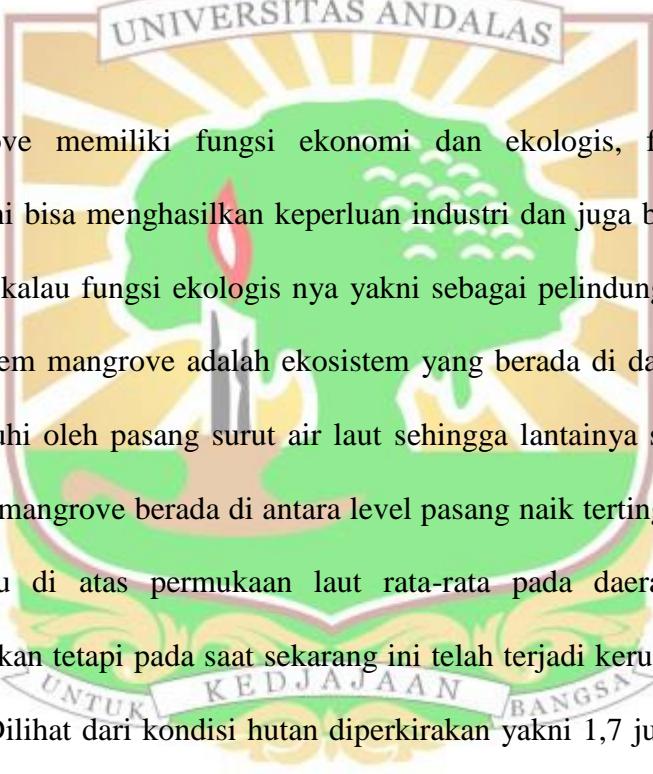
³ Op.cit.

Sedangkan di Indonesia sendiri hutan mangrove menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan panjangnya garis pantai yang ada di Indonesia. Luas hutan mangrove diindonesia yakni 8,6 juta Ha yang terbagi yaitu 3,8 juta Ha terdapat dikawasan hutan dan begitu juga 4,8 juta Ha terdapat diluar kawasan hutan. Dengan begitu luasnya hutan mangrove yang dimiliki Indonesia dan juga begitu banyak potensi hutan yang ada, sehingga dampak yang sangat baik untuk kebutuhan di Indonesia sendiri.



Sumber: Rahmanto (2020)

Dari gambar 1.1 merupakan persebaran mangrove yang ada di Indonesia, dengan banyaknya persebaran mangrove di tepi pesisir pantai yang berada di Indonesia salah satunya di Papua yakni 1.497.724 ha menjadikan papua yang memiliki mangrove yang terbesar berada di Indonesia, dan yang paling sedikit yaitu berada di Bali Nusa Tenggara yaitu sebesar 34.835 ha. Dengan keberadaan hutan mangrove tersebut ini menjadikan perairan Indonesia sangat kecil terkena dampak yang akan terjadinya pengikisan yang terdapat di pantai Indonesia tersebut

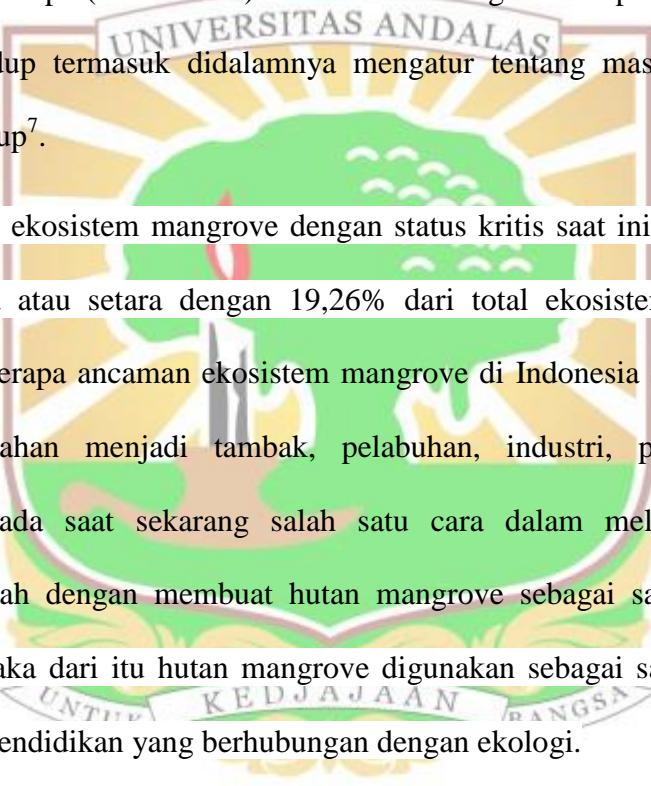


Mangrove memiliki fungsi ekonomi dan ekologis, fungsi ekonomi mangrove yakni bisa menghasilkan keperluan industri dan juga bahan kebutuhan rumah tangga, kalau fungsi ekologis nya yakni sebagai pelindung garis atau tepi pantai. Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi⁴. Akan tetapi pada saat sekarang ini telah terjadi kerusakan mangrove di Indonesia. Dilihat dari kondisi hutan diperkirakan yakni 1,7 juta ha (44.73 %) hutan mangrove di dalam kawasan hutan dan 4,2 juta ha (87.50 %) hutan mangrove di luar kawasan hutan dalam keadaan rusak⁵.

⁴Utomo, B., Budiastuti, S., & Muryani, C. (2017). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117-123.

⁵ Ibid.

Kusmana mengatakan begitu banyak faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan mangrove dengan adanya pencemaran, konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, penebangan mangrove yang sangat berlebihan, dengan adanya pembangunan dermaga dan perluasan areal tambak ke arah laut⁶. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah Kerusakan lingkungan hidup⁷.



Kondisi ekosistem mangrove dengan status kritis saat ini yaitu mencapai 637.624,31 Ha atau setara dengan 19,26% dari total ekosistem mangrove di Indonesia. Beberapa ancaman ekosistem mangrove di Indonesia disebabkan oleh Alih fungsi lahan menjadi tambak, pelabuhan, industri, pemukiman dan perkebunan. Pada saat sekarang salah satu cara dalam melestarikan hutan mangrove adalah dengan membuat hutan mangrove sebagai salah satu tujuan ekowisata. Maka dari itu hutan mangrove digunakan sebagai salah satu sarana agar kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan ekologi.

Mangrove sebagai ekowisata yaitu suatu bentuk perjalanan wisata ke area alam yang dilakukan dengan tujuan mengkonversi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat⁸. Khoirul dalam penelitiannya

⁶ Rahim, S., & Baderan, D. W. K. (2017). Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya. Deepublish.

⁷ Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

⁸ Ibid, hal 38

yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya” menyimpulkan bahwa Salah satu fungsi sosial hutan mangrove yaitu memungkinkannya berfungsi sebagai tujuan wisata. Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk konsep wisata (ekowisata) sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari old tourism yaitu wisatawan yang hanya datang melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi new tourism yaitu wisatawan yang datang untuk melakukan wisata yang di dalamnya ada unsur pendidikan dan konservasi⁹. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya wisata mangrove yakni salah satu bentuk pelestarian hutan mangrove yang dikelola dalam bentuk pariwisata.

Pengembangan ekowisata mangrove pada saat sekarang sudah mulai gencar dilakukan di beberapa daerah. Salah satu daerah yang telah berhasil melakukan pengelolaan hutan mangrove melalui bentuk ekowisata adalah Desa Wisata Apar, yang pada tahun 2021 ini mendapatkan penghargaan terbaik kategori Desa Digital pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut adalah adanya wisata tracking ke hutan mangrove di area tepi mangrove¹⁰. Sumatera barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekowisata mangrove di beberapa kawasan garis pantainya. Salah satu daerah yang ingin mengembangkan konsep ekowisata mangrove berada di

⁹ Khoirul, U. (2013). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya (Doctoral Dissertation, UPN "Veteran" Jatim).

¹⁰Pertiwi, Fuji. (2021). Desa Apar Pariaman Juara 3 Desa Digital ADWI 2021. Republika.(<https://www.republika.co.id/berita/r3sbhu457/desa-apar-pariaman-juara-3-desa-digital-adwi-2021>), diakses 16 Desember 2021

wilayah kabupaten pesisir selatan, yaitu berada di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan yang menjadi kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesisir Selatan, yang memiliki sebuah potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi suatu tempat wisata. Potensi wisata bahari menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk membuat fungsi kawasan wisata yang selaras dengan kebaharian.

Dalam pengembangan ekowisata perlu adanya aspek yang mendukung yakni aspek destinasi yang akan memberikan dampak dalam pengembangan wisata di Indonesia. Adapun aspek tersebut dapat melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan wisata yang berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Dalam penjelasan wisata alam yakni kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam, begitu juga dengan daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis kepada anugerah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam seperti pantai, terumbu karang¹¹. Berikut ini luas persebaran hutan mangrove per daerah di Sumatera Barat:

¹¹ Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media.

Tabel 1. 1
Persebaran Mangrove di Sumatra Barat

| No | Nama Daerah | Luas |
|----|-----------------|-------------|
| 1 | Mentawai | 32.600 Ha |
| 2 | Pasaman | 6.273, 5 Ha |
| 3 | Pesisir Selatan | 325 Ha |
| 4 | Agam | 313, 5 Ha |
| 5 | Padang Pariaman | 200 Ha |
| 6 | Padang | 120 Ha |

Sumber: sumbarprov.go.id

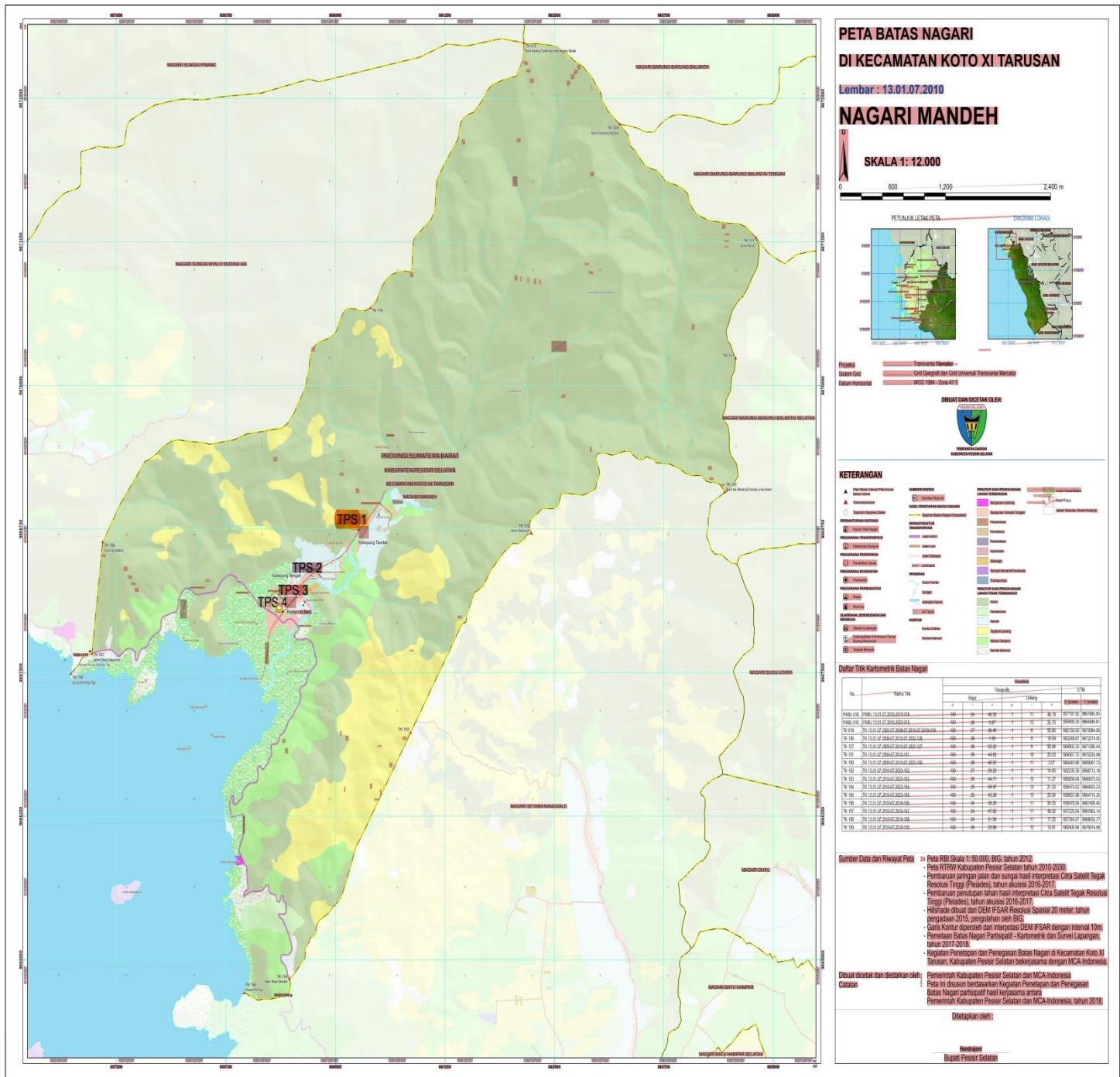
Tabel diatas berikut adalah luas mangrove yang ada di sumatra barat, Mentawai 32.600 Ha, Pasaman 6.273,5 Ha, Pesisir selatan 325 Ha, Agam 313,5 Ha, padang Pariaman 200 ha dan padang 120 Ha. Dari keenam luas mangrove tersebut Mentawai memiliki mangrove yang sangat luas di Sumatra Barat yakni sekitar 32.600 Ha, sedangkan yang paling sedikit mangrove nya berada di kota padang yakni sebanyak 120 Ha. Pesisir selatan terdapat di urutan nomor tiga yakni dengan luas persebaran mangrove nya 325 Ha.

Di pesisir selatan terdapat begitu banyak mangrove yang berada di pesisir lautan nya, salah satunya berada di kawasan nagari mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir selatan yang saat ini mandeh dijadikan salah satu

tempat destinasi wisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Mangrove di pesisir selatan menjadikan salah satu destinasi wisata bahari yang mengembangkan tren wisata alam agar mangrove yang ada di sana juga dapat ter lestarikan sebagai mana yang diinginkan oleh pemerintah nagari tersebut. Dan di kawasan mandeh sendiri pemerintah nagari ingin menjadikan tempat wisata yang akan mendapatkan retribusi pendapatan nagari, disitu juga masyarakat juga dapat mengelolanya supaya perekonomian di nagari mandeh tersebut menjadi stabil. Berikut gambar mangrove yang ada di nagari mandeh tersebut.



**Gambar 1. 2 Peta Foto Udara Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan
Pesisir Selatan**



Sumber: pemerintah Nagari Mandeh

Berdasarkan gambar 1.2 menjelaskan bahwa nagari mandeh memiliki luas penggunaan lahan sebanyak 2.481,71 Ha yang terdiri dari jalan, hutan, pemukiman, sawah, dan lain sebagainya. Kempung mandeh memiliki kuas hutan mangrove sekunder sebanyak 82,02 ha dan merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan mangrove terluas di Pesisir Selatan. Akan tetapi penggunaan lahan mangrove tersebut di Mandeh ± 50 ha akan digunakan untuk kawasan ekowisata. Mangrove di mandeh sendiri memiliki keindahan yang sangat menarik dengan banyaknya tempat wisata selain mangrove yakni hantaran pulau-pulau yang sangat banyak menjadikan daya tarik wisata yang akan menjadikan wisata mangrove salah satu wisata yang akan banyak diminati oleh banyak orang. Dengan banyaknya spot tersebut pengunjung juga akan disuguhkan dengan keindahan hutan mangrove yang berada di kawasan mandeh tersebut yang masih terjaga, suasana serba hijau dan jalur yang dibuat tersebut akan menghasilkan spot untuk berfoto di kawasan hutan mangrove tersebut.

Pengelolaan ekowisata mangrove diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038¹², mengatakan strategi pengelolaan hutan mangrove meliputi peningkatan luas rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak, pengembangan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat, pengelolaan kawasan hutan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan mangrove dan juga.

¹² Perda nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038

Kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.

Berdasarkan kepada UU Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)¹³, dimana kawasan ini masuk kedalam Kawasan Pariwisata Nasional (KPN) Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana kawasan ini masuk dalam Kawasan pariwisata Nasional Pesisir Selatan. Kawasan Mandeh ditargetkan menjadi daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat disamping sektor perikanan yang telah menjadi basis keunggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut juga tertuang dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, pengembangan Kawasan Mandeh yang mencakup sektor pariwisata, perikanan dan pelabuhan¹⁴.

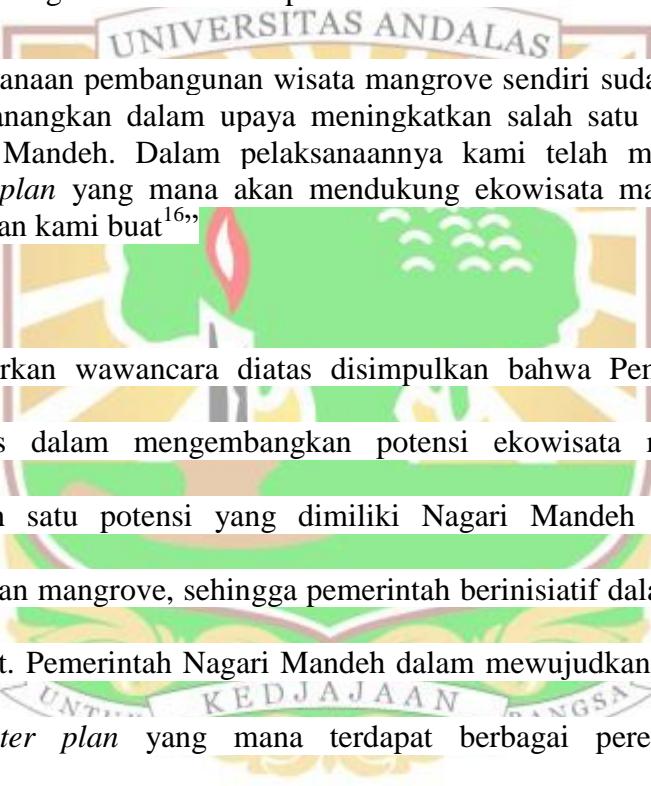
Dalam Perbup Pesisir selatan Nomor 46 tahun 2017 pasal 8 ayat 2 mengatakan Pembangunan kawasan perdesaan berskala kawasan, didanai dari APBNagari dan pelaksanaannya diserahkan kepada nagari atau kerja sama antar nagari¹⁵. Dalam peraturan bupati tersebut dapat dikatakan bahwasanya apabila pembangunan yang dilakukan oleh suatu nagari itu akan diberikan sepenuhnya pelaksanaanya kepada nagari tersebut, dengan didanai oleh APBNagari tersebut dan juga nagari dapat bekerja sama antar nagari disekitarnya tersebut.

¹³ UU Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)

¹⁴ Mukhti, 2016. Rancangan Pengelolaan Minawisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh Sumatera Barat. Program Magister Keahlian Teknik Manajemen Pantai Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

¹⁵ Peraturan Bupati pessel Nomor 46 tahun 2017 pasal 8 ayat 2.

Kawasan ekowisata yang berada di Mandeh sendiri juga memiliki suatu perencanaan dalam memanfaatkan hutan mangrove yang berada di daerah mandeh sendiri yaitu dengan adanya master plan yang telah ada dibuat oleh nagari sendiri, dan disini nagari juga bertindak sebagai pengelolaan hutan mangrove dalam menjadikan mangrove tersebut sebagai suatu tempat wisata baru yang berada di kawasan desa Mandeh tersebut. Hal ini yang dikatakan oleh Bapak Arwis selaku Sekretaris Wali Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.


“Perencanaan pembangunan wisata mangrove sendiri sudah lama kami canangkan dalam upaya meningkatkan salah satu potensi Nagari Mandeh. Dalam pelaksanaannya kami telah membuat *master plan* yang mana akan mendukung ekowisata mangrove yang akan kami buat¹⁶,”

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Mandeh serius dalam mengembangkan potensi ekowisata mangrove yang dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki Nagari Mandeh adalah luasnya keberadaan hutan mangrove, sehingga pemerintah berinisiatif dalam mewujudkan potensi tersebut. Pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan tujuannya telah membuat *master plan* yang mana terdapat berbagai perencanaan dalam pengembangan ekowisata mangrove.

¹⁶ wawancara dengan Bapak Arwis selaku Sekretaris nagari mandeh, pada tanggal 3 Juni 2021, pukul 10.35 WIB.

Gambar 1. 3 Master Plan Pemerintah Nagari Mandeh



Sumber: pemerintah Nagari Mandeh

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa perencanaan dalam mewujudkan ekowisata mangrove terdapat beberapa perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan potensi ekowisata tersebut. Perencanaan terdiri dari pembangunan ruang pengelolaan *cottage*, dermaga, gudang, toilet, stand Cano, parkir Cano, *gallery mangrove* dan restoran, *cottage*, *cage seafood*, *laundry*, *linen*, menara pandang, *gazebo*, workshop mangrove, suvenir, ruang pengelolaan mangrove park, tugu mangrove dan mangrove park. Perencanaan tersebut merupakan rancangan dalam mewujudkan mangrove yang dimiliki sebagai salah satu lokasi ekowisata di Sumatera Barat.

Dalam hal pembangunan ekowisata yang berada di nagari mandeh tersebut ada juga terjadi pro dan kontra terhadap pembangunannya yakni salah satunya dengan warga setempat, dengan itu pemerintah nagari memiliki tantangan tersendiri dengan adanya masyarakat yang nakal terhadap mangrove yang ada di sekitar nagari mandeh tersebut. Hal ini yang disampaikan oleh Arwis selaku Sekretaris Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.

“Masyarakat di sekitaran desa mandeh tersebut kadang ia melakukan penebangan hutan mangrove tersebut secara liar tanpa adanya sepengertian dari pemerintah nagari, maka dari itu pemerintah nagari agak susah untuk melarangnya dikarenakan pada masa pandemic pada saat sekarang ini mata pencarian mereka agak susah dari sebelumnya. Masyarakat tersebut membabat hutan mangrove tersebut dan diambil kayunya yang akan bisa dijual kepada pengumpul dalam menghasilkan uang. Masyarakat tersebut menganggap hutan yang dia babat tersebut menganggap hutan tersebut milik pribadi, mungkin dari pemerintah nagari hanya bisa memberikan pengarahan/ saran kepada masyarakat, agar hutan mangrove tersebut jangan di sia - siakan itu adalah suatu aset yang ada di nagari mandeh itu sendiri

agar dapat dikembangkan menjadi suatu tempat wisata yang akan berdampak kepada ke masyarakat itu sendiri”¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KPHL Bukit Barisan memiliki sudut pandangan yang berbeda dalam mewujudkan ekowisata mangrove:

“Semenjak kawasan Mandeh sudah menjadi wilayah ekonomi, yang membuat pengelolaan atau pengawasan mangrove tidak dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan lagi, karena tidak menjadi wewenang atau wilayah kerja dari KPHL Bukit Barisan. Jadi pada saat sekarang pengelolaan diserahkan pada pemerintah nagari Mandeh. Sekarang ini Pemerintah Nagari Mandeh sedang mencanangkan pembentukan ekowisata mangrove, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pelestarian mangrove melalui kegiatan tersebut.”¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap hutan mangrove dikarenakan kehilangan mata pencarian masyarakat di desa mandeh tersebut. Permasalahan ini disebabkan oleh kesalahan masyarakat itu sendiri dengan membabat hutan dan mengambilnya dalam mencari uang. Disini pemerintah yang menginginkan pembangunan ekowisata di hutan mangrove tersebut agar dapat masyarakat dalam mengelola wisata hutan mangrove yang sudah direncanakan pemerintah nagari. Agar masyarakat disana untuk tidak mengambil sembarangan kayu yang berada di hutan mangrove, dan wisata tersebut pemerintah menginginkan masyarakat yang akan mengelola agar mata pencarian masyarakat tidak lagi susah dengan adanya tempat wisata tersebut.

Dan masyarakat bisa juga bersinergi dalam mensukseskan pembangunan ekowisata tersebut agar cepat dalam pelaksanaan wisata mangrove yang ada di desa Mandeh tersebut.

¹⁷ wawancara dengan Bapak Arwis selaku Sekretaris nagari mandeh, pada tanggal 3 Juni 2021, pukul 10.35 WIB.

¹⁸ wawancara dengan Bapak Kusworo selaku Kepala KPHL Bukit Barisan, pada tanggal 26 April 2021, pukul 09.35 WIB

Berdasarkan lampiran 1.1 surat keputusan dari KPHL Bukit Barisan sebagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut, pemindahan wewenang hutan mangrove dari KPHL kepada Pemerintah Nagari Mandeh. Supaya Pemerintah Nagari Mandeh dapat menjadikan ekowisata mangrove yang ada di Nagari nya tersebut. Mewujudkan ekowisata mangrove di Nagari Mandeh diperlukan adanya manajemen strategis dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi organisasi akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Strategi dapat dilihat dari visi dan misi Nagari Mandeh dalam mewujudkan wisata mangrove. Dalam mewujudkan hal tersebut visi yang ingin dicapai adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki yaitu adanya hutan mangrove. Hutan Mangrove merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Nagari Mandeh dalam tujuan meningkatkan perekonomian nagari. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Nagari Mandeh, yang mengatakan bahwa:

“Mewujudkan ekowisata mangrove itu tidak tertuang secara tertulis dalam visi dan misi pemerintahan nagari, akan tetapi mewujudkan ekowisata mangrove merupakan visi pemerintah nagari serta masyarakat dalam mengembangkan potensi yang kami miliki, untuk meningkatkan perekonomian dan adanya lapangan kerja bagi pemuda nagari”¹⁹

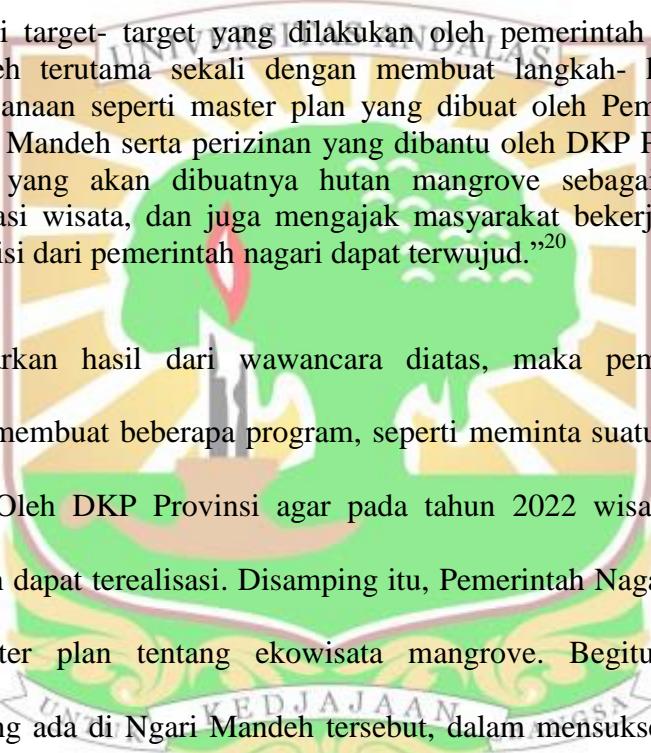
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan ekowisata mangrove adalah bentuk visi dan misi setiap lapisan yang terdapat di Nagari Mandeh. Secara umum pembentukan ekowisata mangrove ialah cara pemerintah nagari dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga

¹⁹ Wawancara dengan Mushendri selaku Wali Nagari Mandeh, pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 13.45 WIB

menjadikan visi yang akan diwujudkan oleh pemerintah nagari dan masyarakat masyarakat mandeh.

Dalam mewujudkan visi tersebut tentunya harus ada misi atau target-target yang akan dilakukan. Pemerintah Mandeh melakukan beberapa kegiatan program/ kegiatan dalam mencapai visi tersebut, yang mana disampaikan oleh Wali Nagari Mandeh:

“Disini target- target yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Mandeh terutama sekali dengan membuat langkah- langkah perencanaan seperti master plan yang dibuat oleh Pemerintah nagari Mandeh serta perizinan yang dibantu oleh DKP Provinsi lahan yang akan dibuatnya hutan mangrove sebagai suatu destinasi wisata, dan juga mengajak masyarakat bekerja sama agar visi dari pemerintah nagari dapat terwujud.”²⁰

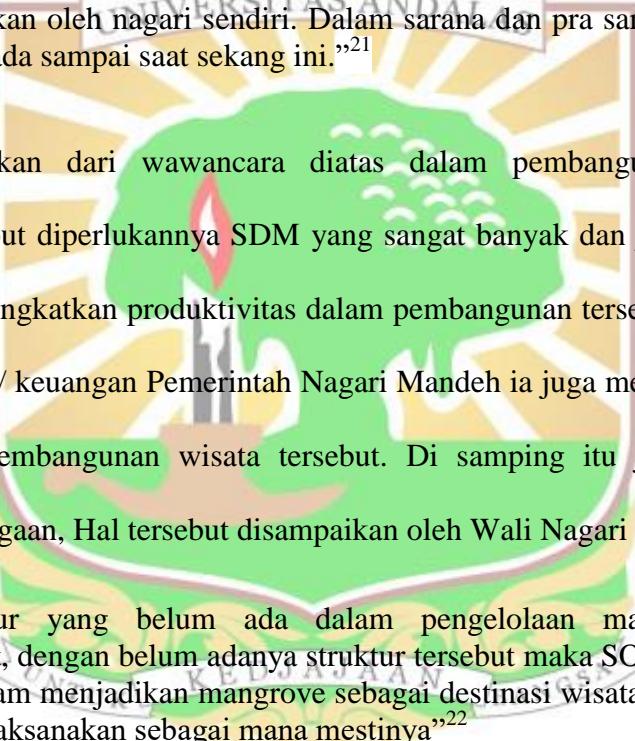


Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, maka pemerintah Nagari Mandeh telah membuat beberapa program, seperti meminta suatu perizinan yang telah dibantu Oleh DKP Provinsi agar pada tahun 2022 wisata mangrove di Nagari Mandeh dapat terealisasi. Disamping itu, Pemerintah Nagari Mandeh juga membuat master plan tentang ekowisata mangrove. Begitu juga peranan masyarakat yang ada di Ngari Mandeh tersebut, dalam mensukseskan ekowisata mangrove agar masyarakat disana supaya dapat bekerjasama dengan pemerintahan nagari agar hal apa yang diinginkan bersama dapat terwujudnya mangrove sebagai destinasi wisata.

²⁰ Wawancara dengan Mushendri selaku Wali Nagari Mandeh, pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 13.45 WIB

Dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata, sangat dibutuhkan dengan adanya Sumber daya yang memadai, misalkan SDM, finansial dan sarana. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Nagari Mandeh:

“Sumberdaya manusia yang berada di Nagari mandeh sendiri begitu belum memadai, yakni dengan sedikitnya jumlah SDM dan pengetahuan yang sangat minim menjadi salah satu penghambat dalam menjadikan mangrove sebagai destinasi wisata. Dalam hal lain keuangan dalam menjadikan mangrove sebagai destinasi wisata, Disini Pemerintah Nagari Mandeh untuk pembangunan tersebut ± 300 juta alokasi dana yang disediakan oleh nagari sendiri. Dalam sarana dan pra sarananya belum ada sampai saat sekarang ini.”²¹



Berdasarkan dari wawancara diatas dalam pembangunan ekowisata mangrove tersebut diperlukannya SDM yang sangat banyak dan juga pendidikan yang dapat meningkatkan produktivitas dalam pembangunan tersebut, begitu juga dengan finansial/ keuangan Pemerintah Nagari Mandeh ia juga menyediakan dana nagari dalam pembangunan wisata tersebut. Di samping itu juga diperlukan strategi kelembagaan, Hal tersebut disampaikan oleh Wali Nagari Mandeh:

“Struktur yang belum ada dalam pengelolaan mangrove tersebut, dengan belum adanya struktur tersebut maka SOP yang ada dalam menjadikan mangrove sebagai destinasi wisata belum bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya”²²

Dari wawancara diatas Pemerintah Nagari Mandeh sendiri dalam menjadikan mangrove sebagai wisata disini belum ada kepengurusan/ struktur dalam menjadikan mangrove sebagai wisata, hal tersebut sejalan dengan SOP

²¹ Wawancara dengan Mushendri selaku Wali Nagari Mandeh, pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 13.45 WIB

²² Wawancara dengan Mushendri selaku Wali Nagari Mandeh, pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 13.45 WIB

yang belum ada oleh Pemerintah Nagari Mandeh sendiri. Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah nagari tersebut yang akan membuat mangrove sebagai destinasi wisata, Begitu juga dengan adanya master plan dan juga kerjasama dengan berbagai kalangan pihak, maka dari itu peneliti tertarik melihat bagaimana Strategi pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tergambar oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu strategi pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Begitu juga dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui strategi pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan media bagi peneliti untuk menerapkan dan menguji teori-teori yang telah dipelajari sehingga nantinya akan menambah nalar peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan. Serta membuat peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.
2. Begitu juga bagi kantor wali nagari Mandeh bagaimana strategi pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata. Hasil dari penelitian ini dapat menjadikan masukan dan sebagai sebuah referensi yang dilakukan pemerintah nagari, bagi kantor wali nagari bagaimana Strategi pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata dan mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan.

